

Research Article

## **Kajian Penyusunan dan Struktur Anggaran Pendidikan di SDN 1 Sindangsari**

**Ahmad Supyan<sup>1</sup>, Dimas Adetiya Asep<sup>2</sup>, Moh. Sugandi<sup>3</sup>**

STAI Al Badar Cipulus Purwakarta, Indonesia <sup>1,2,3</sup>

e-mail: [ahmadsupyano85@gmail.com](mailto:ahmadsupyano85@gmail.com), [dimasadetiyaasep@gmail.com](mailto:dimasadetiyaasep@gmail.com),  
[sugandi@albadar.ac.id](mailto:sugandi@albadar.ac.id)

### **Abstrak**

Penyusunan anggaran pendidikan merupakan salah satu aspek strategis dalam manajemen sekolah karena berperan langsung dalam menentukan alokasi sumber daya keuangan, material, dan manusia untuk mencapai tujuan pendidikan. Perencanaan anggaran yang efektif memastikan setiap kegiatan sekolah mulai dari pelaksanaan pembelajaran, pemeliharaan sarana prasarana, hingga pengembangan kompetensi guru dapat terlaksana secara efisien dan berkelanjutan. Sebaliknya, anggaran yang tidak terstruktur dengan baik dapat menimbulkan ketidakefisienan, salah alokasi sumber daya, serta menurunkan mutu layanan pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai proses penyusunan, struktur, dan implementasi anggaran sekolah menjadi penting untuk meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas Pendidikan.

**Kata Kunci:** Anggaran pendidikan, struktur anggaran, penyusunan anggaran, partisipasi pemangku kepentingan.

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal, dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik dan transparan, terutama dalam hal penyusunan serta struktur anggaran pendidikan di tingkat satuan pendidikan dasar (Mulyasa, 2004). Anggaran pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian keuangan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang menentukan arah pengembangan mutu pembelajaran di sekolah (Nasional, 2001). Oleh karena itu, proses penyusunan anggaran harus mencerminkan kebutuhan riil sekolah, partisipasi pemangku kepentingan, serta kesesuaian dengan regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Nasional, 2003), yang mengatur tentang standar pendidikan di Indonesia.

Dalam konteks sekolah dasar, seperti SDN 1 Sindangsari, penyusunan dan struktur

anggaran pendidikan memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Sekolah harus mampu menyusun rencana anggaran yang efektif dan efisien agar setiap kegiatan pendidikan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun, pada praktiknya seringkali ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan dana, kurangnya pemahaman terhadap regulasi anggaran, serta minimnya partisipasi dari guru dan komite sekolah dalam proses perencanaan (Ansori & Sinaga, 2025). Hal ini dapat menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi anggaran, serta menurunkan efektivitas pengelolaan keuangan sekolah.

Kajian ini berfokus pada analisis mekanisme penyusunan dan struktur anggaran pendidikan di SDN 1 Sindangsari. Tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana proses penyusunan anggaran dilakukan secara partisipatif, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran serta memberikan rekomendasi yang dapat menjadi acuan bagi sekolah dasar lainnya dalam meningkatkan tata kelola keuangan pendidikan. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem manajemen keuangan pendidikan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan di tingkat sekolah dasar.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana proses penyusunan anggaran di SDN 1 Sindangsari telah dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip partisipatif mencakup keterlibatan seluruh pemangku kepentingan sekolah seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, serta perwakilan orang tua dalam merumuskan prioritas pendanaan dan menentukan arah kebijakan keuangan sekolah. Transparansi berarti keterbukaan informasi keuangan sekolah kepada pihak internal maupun eksternal, termasuk penyajian laporan penggunaan dana yang mudah diakses dan dipahami. Sedangkan akuntabilitas publik menekankan tanggung jawab sekolah dalam menggunakan anggaran sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip efisiensi yang berlaku (Nanang, 2016).

Menelaah aspek ideal dari perencanaan anggaran, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai hambatan dan tantangan nyata yang dihadapi oleh sekolah dalam pengelolaan keuangan. Hambatan tersebut dapat mencakup keterbatasan dana operasional, ketergantungan tinggi pada dana BOS, kurangnya kompetensi sumber daya manusia dalam bidang akuntansi sekolah, hingga minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan anggaran. Faktor-faktor ini tidak hanya berdampak pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, tetapi juga pada kualitas tata kelola sekolah secara keseluruhan. Oleh karena itu, hasil kajian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi sekolah dasar lainnya untuk memperbaiki pola perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi anggaran pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki signifikansi praktis dan akademik yang tinggi. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi dasar bagi pihak sekolah dan Dinas Pendidikan dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Secara akademik, kajian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai manajemen keuangan pendidikan dasar di Indonesia, khususnya pada aspek penyusunan dan struktur anggaran sekolah negeri di wilayah

pedesaan. Melalui pemahaman yang lebih komprehensif terhadap proses penyusunan anggaran pendidikan, diharapkan terwujud tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan di tingkat sekolah dasar.

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Pendidikan dan Pengelolaan Keuangan Sekolah**

Teori pembangunan pendidikan menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks tersebut, manajemen keuangan sekolah menjadi instrumen strategis yang menentukan keberhasilan program pembelajaran. Anggaran pendidikan dipahami sebagai alat perencanaan, pengendalian dan kebijakan publik yang dirancang untuk memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan optimal. Teori administrasi pendidikan menekankan bahwa penyusunan anggaran harus berbasis kebutuhan riil sekolah, sesuai regulasi, dan melibatkan pemangku kepentingan secara aktif (Mulyasa, 2004; Nasional, 2001).

### **2. Teori Penyusunan Anggaran (Budgeting Theory)**

Teori penyusunan anggaran menyoroti beberapa prinsip kunci, yaitu efektivitas, efisiensi, akurasi dan kesesuaian dengan prioritas kebutuhan pendidikan. Pada tataran sekolah dasar, penyusunan anggaran mencakup mekanisme perencanaan, penetapan program, estimasi biaya hingga evaluasi penggunaan dana. Proses anggaran yang baik harus disusun secara rasional dan berorientasi pada capaian mutu pembelajaran. Selain itu, teori ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan sumber dana yang tersedia, termasuk BOS, iuran sukarela dan hibah pemerintah daerah (Sari & Handa, 2025).

### **3. Prinsip-Prinsip Manajemen pembiayaan**

Prinsip partisipasi menekankan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan sekolah dalam proses perencanaan keuangan. Teori partisipatif menjelaskan bahwa kebijakan anggaran menjadi lebih efektif apabila disusun melalui musyawarah bersama antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan orang tua. Partisipasi ini membangun rasa memiliki (*sense of ownership*) serta meningkatkan legitimasi kebijakan anggaran. Transparansi merupakan unsur utama *good governance* dalam pendidikan. Prinsip transparansi mengharuskan sekolah menyediakan informasi keuangan yang jelas, terbuka, dan mudah diakses, baik dalam bentuk laporan penggunaan dana, papan informasi publik, maupun dokumen RKAS. Transparansi juga terkait dengan penyampaian informasi secara jujur mengenai sumber dana, alokasi belanja, serta hasil realisasi anggaran (Nanang, 2016).

4. Hambatan-Hambatan dalam Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran

Teori hambatan organisasi (organizational constraints) menjelaskan bahwa proses penganggaran dapat terhambat oleh faktor internal maupun eksternal. Dalam konteks sekolah, hambatan umum mencakup keterbatasan dana operasional, kompetensi SDM yang rendah dalam akuntansi sekolah, ketergantungan pada dana BOS dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Hambatan-hambatan ini memengaruhi konsistensi antara rencana dan realisasi anggaran, serta berdampak pada mutu tata kelola sekolah

5. Signifikansi Teoretis dan Praktis

Secara teoritis, penelitian tentang penyusunan anggaran pendidikan memperkaya khazanah literatur terkait manajemen keuangan sekolah, khususnya di lingkungan sekolah dasar pedesaan. Secara praktis, teori-teori mengenai partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi rujukan untuk memperkuat sistem tata kelola keuangan sekolah. Dengan pemahaman teoritis yang kuat, sekolah dapat merancang strategi perbaikan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran secara lebih komprehensif.

## **METODE DAN PENDEKATAN PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis proses penyusunan serta struktur anggaran pendidikan di SDN 1 Sindangsari berdasarkan prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena secara mendalam melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian, sehingga data yang diperoleh bersifat naturalistik dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Desain deskriptif analitis memungkinkan peneliti memaparkan peristiwa sebagaimana adanya, kemudian menganalisisnya menggunakan teori yang relevan untuk menghasilkan pemahaman komprehensif terhadap proses penyusunan anggaran (Creswell & Creswell, 2017).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, yang digunakan untuk menggali secara langsung pengalaman, pandangan, serta pemaknaan para informan terkait mekanisme perencanaan dan pengelolaan anggaran sekolah. Melalui wawancara, peneliti dapat memahami dinamika internal sekolah, pola komunikasi antar pemangku kepentingan, serta faktor-faktor yang memengaruhi proses penyusunan anggaran. Teknik wawancara mendalam dipilih karena mampu memberikan data yang kaya dan kontekstual, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang tidak hanya bersifat faktual, tetapi juga interpretatif sesuai perspektif informan (Creswell & Creswell, 2017; Moleong, 2017). Desain deskriptif analitis memungkinkan peneliti menggambarkan peristiwa sebagaimana adanya, kemudian menganalisis temuan tersebut menggunakan teori yang relevan

untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai penyusunan dan struktur anggaran pendidikan di SDN 1 Sindangsari.



**Gambar 1.** Proses Wawancara dengan Pihak Sekolah tentang Penyusunan Anggaran Pendidikan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kajian ini membahas penyusunan dan struktur anggaran di SDN 1 Sindangsari yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang meliputi:

### **1. Proses Penyusunan Anggaran Pendidikan di SDN 1 Sindangsari**

Proses penyusunan anggaran pendidikan di SDN 1 Sindangsari diawali dengan kegiatan analisis terhadap rapor mutu pendidikan sebagai dasar utama dalam menentukan arah dan prioritas pendanaan sekolah. Sejak diterapkannya Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sekolah-sekolah termasuk SDN 1 Sindang Sari diwajibkan untuk menjadikan hasil rapor mutu sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan. Rapor mutu ini berisi gambaran menyeluruh tentang capaian kinerja sekolah dalam berbagai aspek, seperti kompetensi literasi, numerasi, karakter, serta kualitas proses pembelajaran (Kemendikbudristek, 2022).

Pihak sekolah melakukan analisis kebutuhan (needs assessment) untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan setelah hasil rapor mutu diperoleh. Misalnya, apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa kemampuan literasi peserta didik masih rendah, maka sekolah memprioritaskan pengadaan buku-buku literasi, baik dalam bentuk buku fiksi maupun nonfiksi, serta bahan ajar tematik yang relevan untuk menunjang peningkatan kemampuan membaca dan memahami teks. Sementara itu, apabila aspek numerasi atau kemampuan berhitung yang perlu diperkuat, sekolah akan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan buku dan modul

matematika, serta perangkat pendukung pembelajaran seperti alat peraga dan media interaktif (Mulyasa, 2004).

Hasil rapor mutu juga menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan bukan hanya fokus pada peningkatan literasi dan numerasi. Misalnya, jika ditemukan bahwa fasilitas belajar masih kurang memadai, maka sekolah akan mengalokasikan dana untuk memperbaiki atau menambah sarana pembelajaran seperti meja dan kursi siswa, peralatan laboratorium, serta perangkat teknologi pendidikan yang menunjang efektivitas proses belajar mengajar (Nanang, 2016). Semua kebutuhan tersebut kemudian dirumuskan dalam dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun secara partisipatif oleh kepala sekolah, guru, dan komite sekolah.

Pendanaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut bersumber dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang disalurkan oleh pemerintah pusat. Dana ini digunakan secara proporsional sesuai dengan prioritas yang ditentukan dalam rapor mutu dan hasil analisis kebutuhan sekolah. Dengan demikian, proses penyusunan anggaran di SDN 1 Sindangsari tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berbasis pada data dan evaluasi kinerja sekolah secara objektif. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, baik dalam hal kualitas pembelajaran, pengembangan kompetensi siswa, maupun peningkatan fasilitas sekolah.

## 2. Komponen Utama dalam Struktur Anggaran Pendidikan di SDN 1 Sindangsari

Komponen utama dalam struktur anggaran pendidikan di SDN 1 Sindang Sari berfokus pada pemenuhan kebutuhan pembiayaan peserta didik, baik dalam aspek pembelajaran di kelas maupun kegiatan penunjang lainnya. Pembiayaan tersebut mencakup penyediaan sarana belajar seperti buku, alat tulis, dan media pembelajaran yang relevan untuk menunjang efektivitas proses belajar mengajar. Salah satu bentuk nyata dukungan anggaran adalah pengadaan perangkat teknologi informasi (IT), khususnya laptop, yang menjadi kebutuhan penting seiring dengan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang rutin dilaksanakan setiap tahun di seluruh jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA. Pengadaan laptop ini tidak hanya bertujuan memenuhi standar pelaksanaan ANBK, tetapi juga mendukung penerapan pembelajaran digital di sekolah. Selain pembelian perangkat baru, sekolah juga mengalokasikan dana untuk pemeliharaan dan perbaikan (service) perangkat tersebut, mengingat setiap perangkat teknologi memiliki masa pakai yang terbatas dan memerlukan perawatan rutin agar tetap berfungsi optimal.

Anggaran sekolah juga digunakan untuk mendukung pengembangan kegiatan ekstrakurikuler, seperti pramuka, yang berperan dalam pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kemandirian peserta didik. Dana dialokasikan untuk pengadaan perlengkapan kegiatan pramuka seperti tenda, tali, tongkat, dan atribut kegiatan lapangan lainnya. Tak hanya itu, sekolah juga memfasilitasi praktik pembelajaran berbasis pengalaman melalui penyediaan alat peraga dan bahan praktik yang relevan dengan kurikulum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan upaya memperkaya metode pembelajaran agar peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih kontekstual dan aplikatif.





**Gambar 2.** Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka di SDN 1 Sindangsari

Sekolah di Kabupaten Purwakarta terdapat kegiatan ekstrakurikuler khas yang dikenal dengan Tatanen di Bale Atikan (TDBA), yaitu program pembelajaran berbasis lingkungan yang menekankan pentingnya keterampilan hidup dan pendidikan karakter melalui kegiatan bercocok tanam serta pengelolaan lingkungan. Untuk mendukung kegiatan TDBA, SDN 1 Sindang Sari menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) guna membeli berbagai kebutuhan pendukung seperti media tanam, sekam mentah, paranet, alat penyiram tanaman, dan selang air. Program ini menjadikan area sekolah sebagai laboratorium mini bagi peserta didik untuk belajar secara langsung di lingkungan sekitar. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berlangsung secara konvensional di dalam kelas, tetapi juga secara eksperiensial dan kontekstual di luar kelas, yang memperkuat pemahaman peserta didik terhadap konsep-konsep sains, lingkungan, serta kemandirian.



**Gambar 3.** Pengelolaan Kebun Sekolah untuk Mendukung Kegiatan Pembelajaran Berbasis Lingkungan

Secara keseluruhan, pengalokasian anggaran di SDN 1 Sindang Sari mencerminkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan akademik, penguatan teknologi pendidikan, dan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pendidikan holistik yang menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, sekaligus mendukung visi Kemendikbudristek untuk menciptakan lingkungan belajar yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi abad ke-21.

### 3. Pihak yang Terlibat dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendidikan di SDN 1 Sindangsari

Struktur organisasi pelaksana kegiatan keuangan sekolah dibentuk secara resmi melalui pembentukan Tim BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dalam proses penyusunan anggaran pendidikan di SDN 1 Sindang Sari. Tim ini berperan sebagai pengelola utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana operasional sekolah. Komposisi tim tersebut terdiri atas beberapa unsur penting, yaitu kepala sekolah selaku penanggung jawab utama, bendahara sekolah, komite sekolah, serta perwakilan guru dan wali murid. Keterlibatan berbagai unsur ini mencerminkan penerapan prinsip partisipatif dan akuntabel dalam tata kelola keuangan pendidikan, sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler (Kemendikbud, 2020).

Kepala sekolah memiliki fungsi strategis sebagai pengambil keputusan dan pengarah kebijakan anggaran, memastikan bahwa setiap kegiatan yang dianggarkan sejalan dengan visi, misi, dan prioritas peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Di sisi lain, bendahara sekolah bertanggung jawab terhadap aspek administratif dan teknis, seperti pencatatan transaksi keuangan, pelaporan, serta pengelolaan kas sesuai prosedur akuntansi sekolah. Sementara itu, komite sekolah berperan sebagai mitra strategis yang memberikan pertimbangan, saran, serta pengawasan terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sekolah (Kemendikbud, 2016).

Menariknya, SDN 1 Sindang Sari juga melibatkan perwakilan orang tua siswa yang tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite sekolah. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memperluas ruang partisipasi publik dalam manajemen keuangan pendidikan. Perwakilan orang tua dipilih secara bergantian setiap tahun oleh pihak sekolah, sehingga terjadi rotasi keanggotaan yang memastikan transparansi dan keberagaman pandangan dalam proses perencanaan anggaran (Mulyasa, 2004). Mekanisme ini bukan hanya memperkuat rasa memiliki (*sense of belonging*) dari seluruh pemangku kepentingan, tetapi juga menjadi sarana edukasi publik mengenai pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan dana pendidikan. Dengan demikian, struktur tim BOS di SDN 1 Sindang Sari telah mencerminkan semangat *good governance*, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengelolaan anggaran pendidikan (Nurkolis, 2003).

### 4. Kesesuaian Anggaran Pendidikan dengan Kebutuhan Operasional dan Pengembangan Sekolah di SDN 1 Sindangsari

Menurut hasil wawancara dengan pihak pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 1 Sindang Sari, proses pengelolaan dana BOS telah dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) BOS Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian



Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Seluruh komponen penggunaan dana, mulai dari alokasi, pelaporan hingga realisasi anggaran, telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Juknis tersebut, terdapat batasan dan proporsi penggunaan dana yang harus dipatuhi oleh satuan pendidikan, antara lain penggunaan maksimal 20% untuk pembayaran honor tenaga pendidik dan kependidikan non-PNS, serta sekitar 10% untuk pengadaan dan penyediaan buku ajar maupun buku literasi yang mendukung peningkatan mutu pembelajaran di sekolah (Kemendikbudristek, 2025).

Dalam praktiknya, SDN 1 Sindang Sari telah melaksanakan pembiayaan sesuai dengan proporsi tersebut. Dana BOS dialokasikan secara efisien untuk mendukung kegiatan operasional sekolah, termasuk pembayaran honor bagi guru honorer yang berkontribusi langsung terhadap proses pembelajaran. Selain itu, pengelola sekolah juga memastikan bahwa pengadaan buku dilakukan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dari Rapor Mutu Pendidikan dan hasil evaluasi capaian Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara kebijakan penggunaan dana dan kebutuhan riil sekolah di lapangan (Nanang, 2016).

Penggunaan dana BOS di SDN 1 Sindang Sari juga mencakup kegiatan pemeliharaan serta perbaikan ringan pada sarana dan prasarana sekolah, seperti pengecatan ruang kelas, perbaikan plafon dan penataan lingkungan sekolah agar lebih layak dan nyaman digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Seluruh kegiatan pemeliharaan ini dilakukan tanpa melampaui batasan yang telah diatur dalam Juknis BOS 2025, yang mengharuskan setiap kegiatan fisik disesuaikan dengan kebutuhan mendasak dan tidak boleh dialihkan untuk pembangunan baru (Kemendikbudristek, 2025).

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana BOS di SDN 1 Sindang Sari telah berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap Juknis BOS menunjukkan adanya komitmen sekolah dalam melaksanakan tata kelola keuangan yang baik (*good financial governance*) dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan. Dengan penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana BOS, SDN 1 Sindang Sari mampu mempertahankan keberlanjutan program-program pendidikan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik di sektor pendidikan dasar.

#### 5. Waktu Pelaksanaan Proses Penyusunan Anggaran Pendidikan di SDN 1 Sindangsari

Setiap tahun, sebelum penyusunan anggaran pendidikan diformalkan, SDN 1 Sindang Sari terlebih dahulu melaksanakan proses perencanaan dan penginputan data melalui ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Proses ini umumnya dimulai pada bulan November, sebagai tahap awal dalam menyusun rencana anggaran untuk tahun anggaran berikutnya. Dalam tahap ini, pihak sekolah melakukan serangkaian kegiatan seperti evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan, identifikasi kebutuhan baru, serta penentuan prioritas program yang akan dibiayai. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara kolaboratif oleh kepala sekolah, bendahara, dan tim manajemen sekolah agar rancangan anggaran yang disusun dapat mencerminkan kebutuhan riil sekolah dan mendukung pencapaian sasaran mutu pendidikan (Kemendikbudristek, 2022).

Tahap penyusunan ARKAS memegang peranan penting karena menjadi dasar dalam proses pengajuan pengesahan anggaran. Setelah semua komponen anggaran terinput dan diverifikasi melalui sistem ARKAS, pihak sekolah akan melakukan peninjauan ulang untuk memastikan kesesuaian antara rencana kegiatan, alokasi dana, dan ketentuan penggunaan anggaran sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Dana BOS Reguler. Proses verifikasi internal ini tidak hanya berfungsi untuk meminimalkan kesalahan administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan sekolah (Nanang, 2016).

Perancangan ARKAS dinilai lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan, sekolah kemudian mengajukan pengesahan anggaran pada bulan Januari, yang menandai dimulainya pelaksanaan program dan penggunaan dana untuk tahun anggaran baru. Waktu pengesahan ini bertepatan dengan awal tahun fiskal pemerintah, sehingga sinkron dengan mekanisme pencairan dan pelaporan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Dengan sistem ini, proses penyusunan dan pengesahan anggaran di SDN 1 Sindang Sari menjadi lebih efisien, terukur, dan terdokumentasi secara digital. Penggunaan aplikasi ARKAS juga membantu sekolah dalam menyesuaikan rencana kegiatan dengan kemampuan pendanaan yang tersedia, sekaligus memperkuat sistem pengawasan dan transparansi publik terhadap pengelolaan keuangan sekolah (Mulyasa, 2004).

#### 6. Sumber Dana yang Digunakan dalam Anggaran Pendidikan di SDN 1 Sindangsari

SDN 1 Sindang Sari dalam pelaksanaan kegiatan operasional dan pengelolaan pendidikannya sepenuhnya bergantung pada sumber dana yang berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah agar setiap peserta didik dapat memperoleh layanan pendidikan yang layak tanpa terbebani biaya operasional (Kemendikbud, 2020). Sumber dana ini menjadi tulang punggung pembiayaan sekolah, mencakup kebutuhan rutin seperti pengadaan alat tulis, pembayaran honorarium tenaga pendidik non-PNS, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta kegiatan peningkatan mutu pembelajaran.

Ketergantungan terhadap dana BOS ini terjadi karena SDN 1 Sindang Sari, sebagai sekolah negeri, tidak memungut biaya pendidikan dari peserta didik. Oleh karena itu, seluruh kegiatan akademik maupun nonakademik sangat bergantung pada besaran alokasi dana BOS yang diterima setiap tahun anggaran. Dana tersebut dikelola berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun secara partisipatif oleh kepala sekolah, guru dan komite sekolah sesuai dengan prioritas kebutuhan satuan pendidikan. Namun, karena dana BOS memiliki aturan penggunaan yang cukup ketat, ruang gerak sekolah dalam melakukan inovasi program kadang menjadi terbatas (Nanang, 2016).

Dalam konteks pengelolaan keuangan pendidikan, kondisi ini menuntut pihak sekolah untuk mengelola dana BOS secara efisien, transparan dan akuntabel agar setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Sekolah juga perlu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penggunaan dana BOS, memastikan bahwa alokasi dana tersebut benar-benar mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan, termasuk pembelajaran literasi, numerasi dan penguatan karakter siswa. Dengan demikian, meskipun SDN 1 Sindang Sari hanya mengandalkan

dana BOS sebagai sumber utama pendanaan, sekolah tetap berupaya mengoptimalkan pengelolaannya agar selaras dengan prinsip good governance dan tujuan peningkatan kualitas pendidikan dasar.

#### 7. Prioritas Anggaran terhadap Peningkatan Mutu Pembelajaran di SDN 1 Sindangsari

Dalam upaya meningkatkan kualitas proses pembelajaran, SDN 1 Sindangsari secara aktif melaksanakan berbagai program pelatihan bagi tenaga pendidik. Pelatihan tersebut mencakup kegiatan webinar daring, workshop tatap muka, hingga pelatihan tematik yang diselenggarakan oleh lembaga resmi pendidikan. Salah satu bentuk implementasinya terlihat pada kegiatan pelatihan yang diikuti oleh perwakilan guru dari sekolah, yang dilaksanakan di Hotel Teguh pada tahun sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru dalam merancang serta melaksanakan proses pembelajaran yang Inovatif (Mulyasa, 2004). Selain itu, terdapat pula pelatihan psikologi pendidikan yang difokuskan pada peningkatan kemampuan guru dalam memahami karakteristik peserta didik, serta pelatihan pendidikan inklusif yang dilaksanakan baik secara daring maupun luring guna mendukung penyelenggaraan pendidikan yang ramah bagi semua kalangan siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Seluruh kegiatan pelatihan tersebut dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang dialokasikan sesuai dengan pedoman penggunaan dana BOS reguler sebagaimana tertuang dalam Permendikbud No. 8 Tahun 2020. Penggunaan dana BOS untuk peningkatan kapasitas guru merupakan bentuk komitmen sekolah dalam menerapkan prinsip pengelolaan anggaran berbasis kebutuhan (needs-based budgeting), di mana peningkatan mutu sumber daya manusia menjadi prioritas utama dalam strategi pengembangan sekolah (Kemendikbud, 2020). Dengan adanya pelatihan tersebut, guru diharapkan mampu mengembangkan model pembelajaran yang kreatif, relevan dan adaptif terhadap perubahan kurikulum serta kebutuhan peserta didik di era digital (Lestari & Kurnia, 2023).

SDN 1 Sindangsari juga mengalokasikan dana BOS untuk pengadaan media pembelajaran yang menunjang efektivitas proses belajar mengajar, selain dari program pelatihan. Media pembelajaran yang digunakan guru beragam, mulai dari bahan sederhana seperti kertas karton, spidol hingga alat bantu visual dan digital yang dikembangkan sendiri oleh guru sesuai dengan karakteristik materi pelajaran. Pendanaan untuk kebutuhan ini diatur secara proporsional dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan mempertimbangkan aspek kreativitas guru dan keterjangkauan biaya (Nasional, 2001). Strategi ini mencerminkan penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan, di mana setiap pengeluaran diarahkan untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa sekaligus memperkuat inovasi dalam pembelajaran (Sagala, 2009).

Melalui kombinasi antara pelatihan guru yang berkelanjutan dan penyediaan media pembelajaran yang memadai, SDN 1 Sindangsari menunjukkan komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Pemberdayaan guru melalui pelatihan dan dukungan sumber daya pembelajaran tidak hanya memperkuat kapasitas individu tenaga pendidik, tetapi juga berkontribusi langsung pada peningkatan hasil belajar siswa dan pencapaian indikator mutu pendidikan sekolah

(Nanang, 2016).

SDN 1 Sindangsari juga melaksanakan program pelatihan berkelanjutan yang dikenal dengan istilah HKG (Hari Kegiatan Guru). Program ini diselenggarakan secara rutin, umumnya satu kali dalam seminggu, dengan tujuan utama meningkatkan kompetensi profesional guru serta memperkuat kemampuan pedagogik mereka dalam mengelola proses pembelajaran. Kegiatan HKG menjadi wadah bagi guru untuk berbagi pengalaman, mendiskusikan permasalahan pembelajaran yang dihadapi di kelas, serta mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih inovatif dan efektif (Mulyasa, 2004).

#### 8. Kendala dalam Proses Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendidikan di SDN 1 Sindangsari

Dalam pelaksanaan penyusunan anggaran pendidikan di SDN 1 Sindang Sari, pihak sekolah menyampaikan bahwa secara umum tidak terdapat kendala yang berarti selama proses berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan anggaran telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Setiap tahap, mulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), hingga pelaporannya, terlaksana secara tertib dan terkoordinasi dengan baik antara kepala sekolah, bendahara, guru, serta komite sekolah (Kemendikbud, 2020).



Gambar 4. Pemandangan Koridor Sekolah dengan Siswa yang Sedang Beraktivitas

Keberhasilan ini tidak terlepas dari komunikasi dan koordinasi yang efektif antarunsur sekolah, terutama antara pihak manajemen dan tenaga pendidik dalam mengidentifikasi kebutuhan prioritas yang akan didanai. Selain itu, pemanfaatan data hasil Rapor Mutu Pendidikan dan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) sebagai dasar perencanaan anggaran menjadikan proses penyusunan lebih terarah dan berbasis pada bukti empiris (Kemendikbudristek, 2022). Dengan demikian, setiap keputusan penganggaran tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar mempertimbangkan urgensi dan relevansi kebutuhan sekolah.

Kelancaran penyusunan anggaran juga didukung oleh kedisiplinan administrasi keuangan serta kepatuhan terhadap pedoman penggunaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Sekolah telah memiliki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang tertata dengan baik sehingga meminimalisir potensi kesalahan atau keterlambatan dalam pengelolaan dana. Keterbukaan informasi keuangan kepada seluruh pemangku kepentingan sekolah turut menciptakan iklim transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, yang menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam tata kelola keuangan pendidikan (Nanang, 2016). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan anggaran di SDN 1 Sindangsari berjalan secara lancar, efisien dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan tanpa menghadapi kendala signifikan.

#### 9. Penyusunan Anggaran Berdasarkan Data dan Kebutuhan Riil Sekolah di SDN 1 Sindangsari

Penyusunan anggaran pendidikan di SDN 1 Sindangsari telah sepenuhnya berbasis pada data dan analisis kebutuhan nyata peserta didik. Hal ini ditandai dengan pemanfaatan rapor mutu pendidikan sebagai titik awal dalam proses perencanaan keuangan sekolah. Rapor mutu menjadi instrumen evaluatif yang menyajikan data objektif mengenai capaian pembelajaran, kinerja guru dan efektivitas manajemen sekolah. Dengan menjadikan rapor mutu sebagai dasar perencanaan, sekolah dapat memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan aktual dan permasalahan yang dihadapi peserta didik (Kemendikbudristek, 2022). Pendekatan ini menunjukkan adanya transformasi paradigma dari pola penganggaran yang bersifat administratif menuju penganggaran berbasis evidence-based planning, di mana setiap keputusan keuangan didukung oleh data dan analisis factual (Nanang, 2016).

Penerapan ARKAS menuntut pihak sekolah untuk lebih disiplin dan sistematis dalam melakukan perencanaan dan pengawasan keuangan bulanan. Setiap transaksi, baik untuk pengadaan barang, kegiatan pembelajaran, maupun perawatan sarana-prasarana, harus dicatat dan dilaporkan melalui aplikasi secara real-time. Dengan demikian, sekolah tidak hanya memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, tetapi juga menjamin bahwa setiap penggunaan dana benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas public (Nurkolis, 2003). Penerapan sistem ini menjadi bukti nyata bahwa SDN 1 Sindangsari telah mengimplementasikan praktik manajemen keuangan modern yang berorientasi pada efisiensi, efektivitas, dan integritas tata kelola pendidikan.

#### 10. Struktur Anggaran Pendidikan dan Prioritas terhadap Peningkatan Kualitas Pembelajaran di SDN 1 Sindangsari

Penerapan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) di SDN 1 Sindang Sari menuntut pihak sekolah untuk bekerja dengan tingkat kedisiplinan dan sistematis yang lebih tinggi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan keuangan setiap bulannya. Melalui ARKAS, seluruh aktivitas keuangan sekolah mulai dari pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, hingga pemeliharaan sarana dan prasarana wajib dicatat dan dilaporkan secara real-time melalui sistem digital yang telah terintegrasi dengan basis data Kemendikbudristek (Kemendikbudristek, 2022).



Implementasi ARKAS di SDN 1 Sindang Sari tidak hanya menjadi bentuk adaptasi terhadap sistem digitalisasi administrasi keuangan, tetapi juga mencerminkan upaya sekolah dalam menerapkan praktik manajemen keuangan modern yang berorientasi pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan integritas tata kelola pendidikan. Melalui sistem ini, sekolah dapat lebih fokus pada pengelolaan sumber daya secara optimal untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan. Dengan demikian, ARKAS berperan sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan sekolah yang transparan, profesional, dan sesuai dengan semangat reformasi birokrasi di bidang pendidikan (Nanang, 2016).

## **KESIMPULAN**

Penyusunan dan pengelolaan anggaran pendidikan di SDN 1 Sindangsari menunjukkan bahwa tata kelola keuangan sekolah berperan penting dalam memastikan tercapainya mutu layanan pendidikan yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Proses perencanaan anggaran telah dilakukan dengan mengacu pada prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas yang melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah serta perwakilan orang tua. Penyusunan anggaran disusun berbasis data melalui pemanfaatan rapor mutu dan hasil ANBK, sehingga setiap alokasi dana baik untuk pembelajaran, sarana prasarana, teknologi, maupun kegiatan ekstrakurikuler benar-benar mencerminkan kebutuhan riil sekolah. Struktur anggaran juga menunjukkan keseimbangan antara kebutuhan operasional, peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan karakter peserta didik melalui program unggulan seperti Pramuka dan Tatanen di Bale Atikan (TDBA).

Pengelolaan dana BOS sebagai sumber pendanaan utama telah dilaksanakan sesuai ketentuan regulasi, termasuk batasan penggunaan dana, mekanisme pelaporan dan proses verifikasi melalui ARKAS. Sekolah mampu menjalankan fungsi penganggaran secara tertib, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan RKAS, hingga pengesahan pada awal tahun anggaran. Meski demikian, penelitian ini juga mengungkap adanya tantangan seperti keterbatasan sumber dana, ketergantungan penuh pada BOS serta kebutuhan peningkatan kompetensi SDM dalam aspek akuntansi pendidikan. Kendala-kendala ini berdampak pada fleksibilitas perencanaan dan menuntut strategi penguatan kapasitas pengelolaan keuangan sekolah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa tata kelola anggaran yang baik bukan hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, ketepatan identifikasi kebutuhan, serta komitmen sekolah terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Temuan dan rekomendasi penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi bagi sekolah dasar lainnya dalam mengoptimalkan perencanaan keuangan berbasis data, meningkatkan efektivitas penggunaan dana pendidikan, dan memperkuat mutu layanan pembelajaran di lingkungan pendidikan dasar.

## **Bibliografi**

- Ansori, A., & Sinaga, S. R. (2025). Peran Komite Sekolah dalam Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan. *Al-Basyir: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 1(4), 18–28.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and*

- mixed methods approaches*. Sage publications.
- Kemendikbud. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbud. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbudristek. (2022). *Rapor Pendidikan: Panduan Pemanfaatan Hasil Asesmen Nasional*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kemendikbudristek. (2025). *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2025*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Lestari, D. I., & Kurnia, H. (2023). Implementasi model pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kompetensi profesional guru di era digital. *JPG: Jurnal Pendidikan Guru*, 4(3), 205–222.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif/Lexy J. Moleong*.
- Mulyasa, E. (2004). *Manajemen berbasis sekolah: konsep, strategi dan implementasi*.
- Nanang, F. (2016). *Landasan manajemen pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Nasional, D. P. (2001). *Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah*. Jakarta: Dirjen. Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.
- Nasional, D. P. (2003). Undang-undang republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. *Language*, 188, 22cm.
- Nurkolis. (2003). *Manajemen berbasis sekolah: Teori, model dan aplikasi*. PT Grasindo.
- Sagala, S. (2009). *Administrasi pendidikan kontemporer*.
- Sari, D., & Handa, M. I. (2025). *Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Penerbit NEM.